



Pusat Pangkas Dana TKD Parepare Rp28,9 Miliar

# Pusat Pangkas Dana TKD Parepare Rp28,9 Miliar

**PAREPARE, UPEKS**--Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2025.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 dan merupakan bagian dari strategi efisiensi belanja negara sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan ini menyasar beberapa pos anggaran penting, termasuk dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik.

Keputusan pemerintah pusat ini, juga dialami Kota Parepare yang mengalami pemangkasan dana transfer ke daerah yang nilainya mencapai Rp28,9 miliar.

Menyikapi itu, Ketua DPRD Kota Parepare Kaharuddin Kadir mengatakan, selaku pimpinan DPRD tentu akan membicarakan dengan pimpinan dewan lainnya terkait dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut

provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

"Keputusan ini, sepertinya dialami seluruh provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia mengalami pengurangan anggaran DAU dan DAK," ujarnya.

Khusus Kota Parepare, Kaharuddin Kadir mengungkapkan telah melakukan komunikasi dengan kepala Badan Keuangan Daerah melakukan langkah-langkah untuk melakukan penyesuaian.

"Saya juga sudah lihat lampiran surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Sepertinya kita Parepare mendapatkan pemangkasan anggaran sebesar Rp28.982.000.000," bebernya.

Dia menjelaskan, pemangkasan anggaran ini tentu mempengaruhi APBD Kota Parepare tahun anggaran 2025.

"Tentu anggaran sebesar hampir Rp29 miliar yang dipangkas ini, sangat berpengaruh terhadap APBD kita. Jika kita mengkaji APBD kita, maka banyak



KAHARUDDIN KHALIK

kegiatan-kegiatan yang harus dihilangkan yang dulunya dianggarkan sebesar Rp28,9 miliar itu. Sehingga akan dilakukan penyesuaian," katanya.

Olehnya itu, kata Kaharuddin, pemangkasan anggaran tersebut akan dilakukan konsultasi

dengan pemerintah provinsi.

"Penyesuaian-penyesuaian segera dilakukan. Termasuk, kita akan bicarakan dengan tingkat pimpinan DPRD dan rencana kami juga akan kita rapat antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mencermati pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa pengurangan anggaran ini tentu mempengaruhi APBD Parepare tahun anggaran 2025. "Tidak ada jalan lain, kecuali kita harus melakukan efisiensi terhadap beberapa mata anggaran yang memang telah disebut dalam instruksi presiden. Item mana saja yang harus kita lakukan efisiensi tentu akan

dibahas dalam rapat Bersama Banggar dan TAPD," ujarnya.

Dia menjelaskan, efisiensi dilakukan dikarenakan karena mungkin secara global kondisi mengalami sedikit turbejaas terhadap keuangan negara.

"Disamping memang ada beberapa program yang mutlak harus dilaksanakan. Walaupun informasi terakhir untuk program makan bergizi gratis, seluruhnya ditanggung oleh pusat. Tetapi anggaran makan bergizi gratis yang sudah kita anggar di APBD sebesar Rp6 miliar sesuai permintaan pemerintah pusat agar digeser ke perbaikan sarana pendidikan. Tetapi, finalisasinya nanti hasil rapat Banggar dan TAPD," tandasnya. (pp/suk)

**KEHILANGAN**

Telah Hilang SHGB No 20199 Tamalate  
Mangasa Kota Makassar Luas 93m<sup>2</sup>  
Surat Ukur No. 02929/2020  
CP : 082148155401 an. Agung

**KEHILANGAN**

Telah Hilang BPKB Motor  
Yamaha 2BJ DD 5802 VB an.  
NURAENI AZIS dgn No. Rangka:  
MH32BJ003EJ469103 dan  
No. Mesin : 2BJ468444